

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN



ANALISIS **KEBIJAKAN** **PENDIDIKAN**

Dr. Dra. Erni Murniarti, S.H., M.Pd.



ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Penulis:

Dr. Dra. Erni Murniarti, S.H., M.Pd.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Farah Chalida Hanoum T, S.P., M.M.

ISBN:

978-623-500-560-7

Cetakan Pertama:

November, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendidikan” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Analisis Kebijakan Pendidikan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN	1
A. Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan	1
B. Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan	20
C. Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan	22
D. Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan	24
E. Nilai-Nilai Analisis Kebijakan Pendidikan	27
BAB 2 ISU DAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN	29
A. Hakikat Isu dan Masalah dalam Konteks Analisis Kebijakan Pendidikan	29
B. Beberapa Masalah Pendidikan yang Seksi di Analisis Kebijakannya	31
C. Karakteristik Masalah dalam Analisis Kebijakan Pendidikan	32
D. Tingkatan Masalah Kebijakan Pendidikan	33
E. Fase dan Metode Penstrukturan Masalah Kebijakan Pendidikan ..	34
BAB 3 PERUMUSAN MASALAH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN	35
A. Hakikat dan Tantangan Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan	35
B. Pendekatan Terhadap Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan	37
C. Tahapan Perumusan Masalah Kebijakan dan Perumusan Kebijakan Pendidikan	40
D. Model Perumusan Kebijakan Pendidikan	41
E. Aktor dalam Perumusan Kebijakan	42
F. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Kebijakan Pendidikan	43
G. Penyusunan Agenda <i>Setting</i> Kebijakan Pendidikan	45
BAB 4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	47
A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan	47
B. Proses Implementasi Kebijakan	50

C. Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan	68
BAB 5 EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	73
A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan	73
BAB 6 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	85
A. Pengertian Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	85
B. Tujuan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	85
C. Tahapan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	86
D. Strategi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	87
E. Media Sosialisasi Kebijakan Pendidikan	88
BAB 7 PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	91
A. Konsep Penelitian Kebijakan Pendidikan (<i>Education Policy Research</i>)	91
B. Pengertian Penelitian Kebijakan Pendidikan	92
C. Ciri-Ciri Penelitian Kebijakan	95
D. Karakteristik Penelitian Kebijakan	95
E. Pendekatan Analisis Penelitian Kebijakan	97
F. Metode Penelitian Kebijakan	99
G. Langkah-Langkah Penelitian Kebijakan	101
BAB 8 KEBIJAKAN PENGELOLAAN GURU DI SEKOLAH DASAR	105
A. Kebijakan Pengelolaan Guru Sekolah Dasar	105
B. Pengelolaan Guru di Sekolah Dasar se Kecamatan Silaeen Toba Sumatera Utara	110
C. Kebijakan Pengelolaan Guru di Sekolah Dasar se Kecamatan Silaeen Toba Sumatera Utara	113
D. Manajemen Kelas Rangkap (<i>Multigrade</i>)	116
BAB 9 KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH	121
A. Pengertian dan Konsep Dasar Otonomi Daerah	121
B. Implementasi Desentralisasi Pendidikan di Era OTDA	129
C. Sasaran Desentralisasi Pendidikan	134
D. Fungsi dan Tujuan Supervisi	136

E. Desentralisasi Pendidikan dan Kendalanya	139
BAB 10 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN	151
A. Pengantar	151
B. Partisipasi Masyarakat.....	152
C. Masalah Pengembangan Pendidikan di Indonesia.....	155
D. Reaktualisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia.....	159
BAB 11 PROSES DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	167
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan	167
DAFTAR PUSTAKA	173

BAB 1

KONSEP DASAR

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Analisis Kebijakan (Pendidikan) merupakan penerapan analisis dalam bidang pendidikan untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran (alternatif solusi) dalam rangka memecahkan masalah publik sebagai bentuk proses pengambilan keputusan bidang pendidikan.

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi data (masalah dibidang pendidikan) untuk merumuskan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah pendidikan. Bentuk kegiatannya bisa berupa pengumpulan, pengolahan dan pendayagunaan data dalam bidang pendidikan untuk masukan yang penting bagi pengambil kebijakan.

Bagian ini menjelaskan beberapa kata kunci (*keyword*), untuk memberikan pemahaman kita lebih komprehensif dan holistik tentang analisis kebijakan pendidikan, antara lain kebijakan (*policy*), kebijakan pendidikan, analisis kebijakan, sampai pada konsepsi analisis kebijakan pendidikan.

1) Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan (*policy*): aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengingat kepada siapapun yang dimaksud untuk di ikat oleh kebijaksanaan tersebut. Menurut Anderson kebijakan diartikan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan dalam didalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai

BAB 2

ISU DAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. HAKIKAT ISU DAN MASALAH DALAM KONTEKS ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Definisi isu dalam kamus Merriam Webster *Online* (2018), bahwa *Issue* berarti *something that people are talking about, thinking about an important topic or subject*. *Oxford Dictionary* menegaskan juga *Issue an important topic or problem for debate or discussion*. Isu itu, terkait dengan perbincangan atau perdebatan yang menimbulkan kontroversi, artinya ada pihak-pihak yang pro dan kontra ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Hal senada dijelaskan bahwa “*Issue*” merupakan suatu pertanyaan tentang fakta, realitas, nilai atau kebijakan yang dapat didiskusikan *issue* sebagai *a contestable question of fact, value or policy* (Nelson and Heath 1986).

Namun pada prinsipnya isu itu, jika dibiarkan tentu akan memiliki efek yang signifikan pada fungsi dan kinerja organisasi termasuk pada target organisasi di masa mendatang. Jadi isu pendidikan jika tidak dimanaj dengan baik berpotensi menimbulkan masalah, baik secara internal maupun dalam kaitan lintas sektoral, sesuai dengan tingkatannya, yaitu 1) isu utama, masalah yang dihadapi besar, berada pada level tertinggi yakni pemerintahan pusat, 2) isu sekunder, dihadapi oleh tingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan penentuan prioritas program, kelompok sasaran, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut 3) isu fungsional, dihadapi dalam tataran fungsi kelembagaan, misalnya anggaran proyek pengadaan, infrastruktur masing-masing lembaga, 4) isu minor, sering ditemukan dalam tingkatan kegiatan khusus.

BAB 3

PERUMUSAN MASALAH

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. HAKIKAT DAN TANTANGAN PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Ada dua hal yang ingin dielaborasi dalam analisis kebijakan pendidikan terkait kaitannya dengan upaya perumusan (formulasi), antara lain, 1) perumusan masalah kebijakan pendidikan, 2) perumusan kebijakan pendidikan. Perumusan masalah merupakan bagian dari tahapan analisis kebijakan (Willian N. Dunn, 2004). Perumusan masalah identik dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan berbagai informasi mengenai kondisi-kondisi aktual yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan publik, termasuk dalam bidang pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dari masalah pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Perumusan masalah kebijakan di bidang pendidikan dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan, *consensus*, kompromi, dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama. Perumusan masalah kebijakan pendidikan menghasilkan dan menguji konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah pendidikan (Fattah Nanang, 2013). Sedangkan perumusan kebijakan atau penyusunan alternatif kebijakan pendidikan juga dipandang proses perencanaan analisis kebijakan pendidikan (Quade, 1984).

BAB 4

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya, pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya.

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement (mengimplementasikan)* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008). Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai

BAB 5

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. KONSEPSI EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan pendidikan tertentu mematuhi kriteria yang ditetapkan dan memiliki dampak yang diinginkan pada audiens target. Proses evaluasi ini dilakukan melalui penerapan analisis kebijakan, dalam rangka menentukan kemandirian kebijakan pendidikan dan potensinya untuk keberhasilan implementasi. Dengan mengevaluasi kebijakan pendidikan, seseorang dapat mengidentifikasi keterbatasan dan kelebihan dalam praktiknya.

Kegiatan evaluasi mewakili puncak dari proses pembuatan kebijakan, menawarkan wawasan berharga untuk lebih menyempurnakan kebijakan pendidikan. Biasanya, evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses berurutan yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam analisis kebijakan tersebut (Winarno, 2008).

Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi kebijakan pendidikan belum tentu merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, karena juga dapat dilakukan selama tahap analisis, terutama ketika kebijakan gagal memenuhi harapan yang diinginkan atau gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk memastikan penilaian kebijakan pendidikan yang komprehensif, menjadi penting untuk menyajikan banyak pembenaran logis. Ini termasuk: a) membedakan kelayakan penerapan kebijakan yang dirancang selama perumusannya, b) mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dirumuskan, c) menetapkan korelasi antara pro dan kontra perumusan kebijakan dengan faktor kontekstual dan tidak langsung yang mempengaruhi pengambilan keputusan, d) menentukan sejauh

BAB 6

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa (peraturan, program, keputusan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat luas) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian nilai-nilai dengan berbagai macam dan sedemikian rupa hingga cara sehingga terbentuk individu yang utuh.

Proses interaksi sosial yang terbangun dengan beberapa orang guna memperoleh *knowledge, attitude, value* dan *essential behavior* untuk keikutsertaan (partisipasi) yang efektif di masyarakat. Sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan *group* pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan.

B. TUJUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan pada umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah, masyarakat umum mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai

BAB 7

PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. KONSEP PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (*EDUCATION POLICY RESEARCH*)

Danim (2005) memberikan pemahaman tentang penelitian kebijakan dengan membedakannya dengan penelitian tradisional. Menurutnya ada dua macam penelitian, yaitu penelitian tradisional (*traditional research*) dan penelitian kebijakan (*policy research*). Penelitian tradisional dalam konteks ini bukan dalam kapasitas untuk dibandingkan dengan penelitian kebijakan sebagai penelitian modern, tetapi lebih karena sifat khasnya saja. Sifat khas penelitian kebijakan itu sendiri terletak pada fokus masalahnya, dimana aplikasi kerja penelitian ini untuk keperluan pembuatan kebijakan.

Ann Majchrzak seperti dikutip Danim (2005) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik merujuk pada hasil penelitian, dimana yang perlu dihasilkan dalam penelitian kebijakan bukan terletak pada sampai mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sampai mana hasil penelitian memiliki aplikabilitas dalam rangka memecahkan masalah sosial.

Pemahaman tentang penelitian kebijakan sering dikacaukan dengan analisis kebijakan. Nugroho (2009) membedakan analisis kebijakan menjadi dua, yaitu analisis untuk kebijakan dan analisis tentang kebijakan. Analisis tentang kebijakan sejajar atau dapat dipahami sebagai sinonim dari penelitian kebijakan, yaitu suatu penelitian tentang suatu kebijakan

BAB 8

KEBIJAKAN PENGELOLAAN GURU DI SEKOLAH DASAR

*(Studi Kasus Kebijakan Pendidikan Pada Guru di
Sekolah Dasar di seKecamatan Silaeen Toba Sumatera Utara)*

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN GURU SEKOLAH DASAR

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Khoirul Syani *et al.*, 2018).

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu:

- a. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama
- b. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukanlah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Maimun, 2007).
- c. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai

BAB 9

KEBIJAKAN DESENTRALISASI

PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi.

Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai *self government*, *self sufficiency* dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Otonomi, menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip I Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan

BAB 10

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

A. PENGANTAR

Seperti diketahui bahwa *United Nation's Development Program* (UNDP) pada tahun 2004 ini menempatkan *Human Development Index* (HDI) Indonesia pada urutan 111 dari 175 negara. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina, posisi Indonesia berada di bawah mereka. Tiga komponen peningkatan HDI yakni indeks kesehatan, indeks perekonomian, dan indeks pendidikan.

Kondisi di atas terkait dengan adanya tuntutan pengembangan sumber daya manusia yang terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Standar mutu baik dari jenis karya, kualitas jasa, dan produk, serta layanan mengalami dinamisasi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan hidup manusia yang terus meningkat pula. Ini artinya bahwa layanan pendidikan kita haruslah mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Hal lain yang menjadi pertimbangan penulisan judul ini adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengembangkan kualitas pendidikan di tanah air ini. Tanggung jawab pengembangan pendidikan anak atau generasi bangsa yaitu berada pada orang tua, masyarakat, dan negara. Partisipasi masyarakat di sini tercakup di dalamnya peran orangtua dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya di luar sekolah atau lembaga pendidikan.

Peran dominan orang tua terutama pada saat anak-anak mereka berada dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang dewasa. Pada masa pertumbuhan orang tua harus memenuhi kebutuhan pokok demi menjamin perkembangan yang sehat dan baik. Menurut Russell (1993)

BAB 11

PROSES DALAM

PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Ahmad Choirul Rofiq (2009:1) menyampaikan kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota (*city*). Selanjutnya, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Riant Nugroho (2008:35-36) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dalam Riant Nugroho (2008:36), kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008:37) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (1990). Pengantar Analisis Kebijakanaksanaan Negara. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>
- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Anderson, James E. (2006). Public Policymaking. Stamford Amerika Serikat: Cengage Learning.
- Ansar & Masaong. (2009). Asesmen Kebutuhan Guru dan Gedung pada Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dalam Rangka wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Lemlit UNG.
- Antoro, Billy. (2010). Sosialisasi SPM Pendidikan Harus Komprehensif. Jakarta: Depdiknas.
- Anwar, K. (2014). Investasi pendidikan (suatu fungsi untuk pendidikan yang bermutu). *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam*, 5, 1–10.
- Arifudin, O. (2022). *Perkembangan Peserta Didik (Tinjauan Teori-Teori Dan Praktis)*.
- Arwildayanto, Arifin, S., & Warni, S. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Awang, A. (2010). *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa: studi kajian pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau*. Pustaka pelajar.

- AZIZAH, S. N. (2023). *Upaya guru pendidikan agama Islam dalam peningkatan iman dan taqwa siswa di SMP Islam Sabilurrosyad Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Berelson, B. (1976). Social science research on population: A review. *Population and Development Review*, 219–266.
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. (2005). *Public policy: Perspectives and choices*. United Kingdom, London: Lynne Rienner.
- Danim, S. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Duke, Daniel L. dan Canady, Robert Lynn, (1991), *School policy*, New York: Mc Graw Hill.Book Company
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Dye, T. (1987). Organizing for Policy Planning: The View from the Brookings Institution. *Power Elites and Organizations*, 169–188.
- Eulau, H., & Prewitt, K. (1973). *Labyrinths of democracy: Adaptations, linkages, representation, and policies in urban politics*. Ardent Media.
- Fattah, N. (2013). *Analisis kebijakan pendidikan*.
- Fathan, R. 2020. Hardiknas 2020 Merdeka Belajar Di Tengah Covid-19. <http://jurnalposmedia.com/Hardiknas2020-Merdeka-Belajar-DitengahCovid-19>
- Ghazali, Irfan, Zakki Teguh Wibawa, dkk. (2021). Analisis kebijakan pendidikan. 05, 67±77.
- Good, C. V. (1973). *Dictionary of education*. McGraw-Hill Book Company.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.
- Hanafi, I., & Ma'sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(1).
- Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 4(1), 48–63.

- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (1995). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 163). Oxford university press Toronto.
- Husein, B. M. (2020). Kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar: Studi kasus di Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta. *Jurnal Cahaya Pendidikan*, 6(2), 56–67.
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). *Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*.
- Jenkins, W. I. (1978). Policy analysis: A political and organisational perspective. (*No Title*).
- Jones, C. O. (1984). An introduction to the study of public policy. (*No Title*).
- Kartodiharjo, H. (2009). *Bahan Kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan*. Bandung: Angkasa.
- Kemendikbud RI, (2016), Penyusunan Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI
- Komalasari, R. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 22–32.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). Public policy: An evolutionary approach. (*No Title*).
- Lindblom, C. E. (1968). *The policy-making*. Citeseer.

- Locke, L. F., Dodds, P., & Graber, K. C. (1984). *Research on Teaching Teachers, where are We Now?* Journal of Teaching in Physical Education.
- Luankali, B. (2007). *Analisis kebijakan publik dalam proses pengambilan keputusan.*
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- MacRae, D. (1985). *Policy indicators: Links between social science and public debate.*
- Masdin, M. (2009). KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI. *Shautut Tarbiyah*, 15(1), 83–101.
- Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy.* New York: HarperCollins
- Mufiz, A. (2004). *Pengantar Administrasi Negara.* Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial.* Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhibbuddin, M. M. (2016). Program Mitra Warga Sebagai Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9–18.
- Murniati, A. R., & Usman, N. (2009). *Implementasi manajemen stratejik dalam pemberdayaan sekolah menengah kejuruan.* Perdana Publishing.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77–88.
- Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nelson, R. A., & Heath, R. L. (1986). A Systems Model For Corporate Issues Management. *Public Relations Quarterly*, 31(3).
- Nugroho, R. (2011). Public policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Pal, L. A. (1997). Beyond policy analysis: Public issue management in turbulent times. (*No Title*).
- Pamungkas, O., Khozain, M. Y. N., Zulaikha, I. R., Putra, M. H., & Setiawan, F. (2021). Konsep Pemikiran Mengenai Kebijakan Bidang Pendidikan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(1), 27–34.
- Perron, M. (1991). Vers un continuum de formation des enseignants: elements d'analyse. *Recherche & Formation*, 10(1), 137–151.
- Prayogo. 2020. Peluang Reformasi Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19.
<https://www.y.prayogo.kalderanews.com/2020/05/peluang-reformasi-pendidikan-ditengah-pandemicovid-19-begini-kata-mendikbud/>.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Quade, E. S. (1989). Analysis for public decisions. (*No Title*).
- Rahardjo, M. (2010). *Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan*. Online),(<http://mudjiarahardjo.com>, diakses 9 November 2010).
- Riant Nugroho, Dwijowijoto (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ripley, R. B. (1985), Policy Analysis in Political Science, California: Wadsworth Publishing Company
- Rohman, A., & Lamsuri, M. (2009). *Politik ideologi pendidikan*. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufon & Hans Simaela
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72.

- Sagala, S. (2017). *Konsep dan makna pembelajaran: Untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar*.
- Saifuddin, A. (2015). Eksistensi kurikulum pesantren dan kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 207–234.
- Saiti, A., & Saitis, C. (2006). In-service training for teachers who work in full-day schools. Evidence from Greece. *European Journal of Teacher Education*, 29(4), 455–470.
- Sapp, T. M. (1996). *Teacher perceptions of the components of effective inservice training in the fine arts and their relationship to the implementation of curriculum improvement innovations*. Georgia State University.
- Sholeh, M. (2011). Analisis kebijakan Nasional Tentang Penuntasan wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Periode 2003-2006 di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Educational Management*, 2.
- Sidney, M. S. (2017). Policy formulation: design and tools. In *Handbook of public policy analysis* (pp. 105–114). Routledge.
- Sofian, E. (2001). Pelatihan Analisis Kebijakan Publik. *MAP-UGM. Yogyakarta*.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sudiyono, (2007), *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta
- Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Suryadi, A., & Tilaar, H. A. R. (1993). Analisis kebijakan pendidikan: suatu pengantar. (No Title).
- Sutapa, Mada, (2005), *Buku Pegangan Kuliah; Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

- Suwandi, S. (2007). Studi Kebijakan Pengelolaan Guru Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(2), 17237.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Suyanto. (2020). Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar. KOMPAS, 08 Pebruasi, 6.
<https://suyanto.id/implikasi-kebijakan-merdeka-belajar/>
- Syafaruddin, S. (2008). *Efektivitas kebijakan pendidikan: konsep, strategi dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta.
- Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1).
- Syukir, B. A. 2020. Menakar Konsep Merdeka Belajar.
<https://intens.news/Menakar-KonsepMerdeka-Belajar> Warsita, B. 2015.
- Taylor, S. (1997). Critical policy analysis: Exploring contexts, texts and consequences. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 18(1), 23–35.
- Ttlaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2009). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Van Meter, D. S. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*.
- Veenman, S. (1997). Combination classrooms revisited. *Educational Research and Evaluation*, 3(3), 262–276.
- Wahab, S. A. (2004). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara Jakarta: Rineka Cipta. *Universitas Negeri Malang*.

- Webster, M. (2014). Merriam webster online. *Merriam-Webster Incorporated*, 556.
- Weimer D.L dan Vening A.R, (2005), *Policy Analysis, Concepts And Practice*, Fourth Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. *Proses Dan Analisis, Intermedia, Jakarta*.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. *(No Title)*.
- Wirawan, W. (2011). Evaluasi teori, model, standar, aplikasi dan profesi. *PT. RajaGrafindo Persada*.
- Witkin, B. R. (1984). Assessing needs in educational and social programs. *(No Title)*.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). *Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar(Telaah Metode Pembelajaran)*. *JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6 (1), 126–136.
- Yani, A. (2010). Kebijakan Distribusi Guru Melalui Participatory Management Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Manajerial*, 9(2), 47–54.
- Yulaini, Erma (2017), Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Palembang.Jurnal Neraca Pedidikan dan Ilm Ekonomi Akuntansi Universitas PGRI Palembang, Vol 1(1) 2017

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Buku Analisis Kebijakan Pendidikan menawarkan sebuah kajian mendalam mengenai dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia dan peranannya dalam membentuk kualitas pendidikan. Dalam buku ini, penulis mengupas berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Diawali dengan pembahasan mengenai landasan filosofis dan teoritis pendidikan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami tujuan utama dari kebijakan pendidikan, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Buku ini juga menganalisis berbagai kebijakan yang pernah diimplementasikan, mulai dari Kurikulum 2013 (K13), Ujian Nasional (UN), hingga penerapan teknologi dalam pembelajaran, serta kebijakan-kebijakan terbaru yang muncul sebagai respons terhadap tantangan pendidikan abad 21. Melalui pendekatan interdisipliner, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, serta sistem pemerintahan yang ada. Buku ini juga memberikan studi kasus yang mendalam mengenai keberagaman kebijakan pendidikan di berbagai daerah dan dampaknya terhadap kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu, buku ini tidak hanya mengkritisi kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa depan. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan peran aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami, Analisis Kebijakan Pendidikan tidak hanya ditujukan bagi akademisi atau praktisi pendidikan, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, pemerhati pendidikan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Buku ini menjadi sumber yang berguna bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam memperbaiki kebijakan pendidikan di tanah air.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-560-7



9

786235

005607